

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gibraltar merupakan sebuah kawasan di semenanjung yang kecil dan berada pada sisi strategis pintu masuk Laut Tengah. Gibraltar berada di ujung selatan Spanyol dan memiliki luas sebesar 6,8 km². Pada tahun 1502, secara resmi wilayah Gibraltar merupakan daerah kekuasaan Spanyol. Namun, pada tahun 1704 Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Sir George Rooke, berhasil menaklukkan Gibraltar melalui perang Suksesi Spanyol (Jordine, 2007). Dalam perang Suksesi, Inggris dan Belanda menyerang Spanyol dengan alasan supaya Spanyol tidak bisa membentuk kekuatan bersama Perancis. Sebab, jika Spanyol dan Perancis bersatu membentuk kekuatan bersama, dikhawatirkan akan memperburuk keseimbangan Eropa. Maka dari itu terjadi penyerangan terhadap Spanyol dan Perancis oleh Inggris dan Belanda di Gibraltar. Kekalahan Spanyol dan Belanda membuat kedua negara ini harus melepaskan semua daerah-daerah kekuasaannya yang ada di Eropa. Tetapi, secara resmi Inggris memiliki hak atas wilayah Gibraltar pada sekitar tahun 1713 melalui perjanjian Utrecht (Jordine, 2007).

Perjanjian tersebut berisi tentang penyerahan Gibraltar sebagai negara bagian teritori Inggris secara formal, dan hal ini sekaligus menjadi penanda kekuasaan Inggris atas wilayah Gibraltar sampai saat ini. Adanya peralihan kekuasaan Gibraltar ini, menjadi salah satu dasar utama dinamika hubungan bilateral antara Spanyol dan Inggris khususnya dalam bidang politik. Dinamika tersebut berupa konflik maupun kesepakatan dan kerjasama yang terjadi di antara Spanyol dan Inggris. Setelah adanya perjanjian Utrecht, memang intensitas konflik Gibraltar jarang terjadi. Tetapi, terkadang konflik tersebut membuat ketegangan dan berujung pada hubungan bilateral yang merenggang.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Gibraltar yang Menjadi Konflik Sengketa Perbatasan Wilayah oleh Spanyol dan Inggris

Sumber: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gi.html>

Perjanjian Utrecht diharapkan bisa menjadi akhir dari konflik kedua negara ini, tetapi hal sebaliknya justru terjadi. Perjanjian ini merupakan titik awal konflik yang sampai saat ini masih belum terselesaikan oleh Inggris dan Spanyol. Rupanya, Spanyol masih belum bisa melupakan dan belum rela dengan adanya perjanjian Uthrect yang membahas pemindahan kekuasaan Gibraltar ke tangan Inggris. Menurut pandangan dari

pihak Spanyol, bahwa perpindahan kekuasaan Gibraltar ke Inggris hanya sebagai imbalan atas kemenangan Inggris dalam perang Suksesi, bukanlah sebagai transfer kedaulatan yang bisa dikuasai Inggris sepenuhnya. Spanyol juga mengklaim bahwa negaranya masih memiliki hak atas wilayah teritorial Gibraltar.

Kemudian, pada tahun 1800-an Spanyol melakukan beberapa kali invasi militer demi berjuang mendapatkan kembali kekuasaannya di Gibraltar (Jackson, 1990). Penyerangan Spanyol tersebut tidak membuahkan hasil karena tentara Spanyol gagal melawan kekuatan angkatan laut Inggris yang superior. Setelah penyerangan ini berakhir, Spanyol memang terlihat tidak melakukan perlawanan kembali. Namun, hal ini masih belum berakhi. Tahun 1963, Spanyol akhirnya berujung pada keputusannya untuk membawa konflik ini kepada PBB. Hal ini dilakukan karena Spanyol merasa bahwa Gibraltar merupakan daerah Spanyol yang secara tidak langsung masih terasa terjajah oleh Inggris. Melalui Fransisco Franco yang merupakan pemimpin Spanyol pada saat itu, ia mengklaim Gibraltar sebagai wilayah Spanyol secara sepihak. Klaim sepihak ini kemudian memunculkan reaksi penolakan dari warga Gibraltar. Permasalahan ini kemudian mendapatkan respon langsung oleh pemerintah Inggris dan mereka mengambil keputusan untuk mengadakan referendum bersama di tahun 1967 (Jordine, 2007).

Upaya-upaya untuk menjaga perdamaian selalu dilakukan oleh ketiga negara. Pada tahun 2005 pemerintah Spanyol, Gibraltar, dan Inggris menyetujui pembentukan proses dialog trilateral. Perjanjian yang dibicarakan dalam dialog trilateral ini membahas berbagai bidang sengketa salah satunya adalah ruang udara. Segala keputusan dan perjanjian dalam dialog ini disetujui oleh ketiga pihak. Output dari dialog ini dapat dilihat dengan keadaan yang kembali damai dan dilakukannya kunjungan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol Miguel Moratinos ke Gibraltar pada Juli tahun 2009. Kunjungan Moiguel Moratinos ini untuk membicarakan permasalahan bersama. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali

dilakukan setelah diserahkan Gibraltar ke Inggris. Namun, perlu diingat bahwa Gibraltar tetap menjadi trigger atas konflik politik antara Inggris dan Spanyol. Hubungan politik kedua negara anggota UE ini akan memanas jika hubungan Gibraltar dan Spanyol sedang memburuk.

Seperti dinamika hubungan yang biasanya, hubungan Inggris dan Spanyol kembali memburuk. Hal ini disebabkan adanya pengiriman kapal Royal Navy ke wilayah Mediterania dan wilayah perairan Gibraltar oleh Inggris di tahun 2012. Kepentingan kapal perang Inggris tersebut dikarenakan untuk perihal latihan militer rutin dan tidak ada kaitannya dengan Gibraltar. Namun, kegiatan tersebut telah ditanggapi berbeda oleh Spanyol.

Spanyol melakukan berbagai upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Selat Gibraltar, namun tindakan yang dilakukan oleh Spanyol ini sebenarnya berdasarkan oleh permasalahan ekonomi di negaranya pada saat itu, sehingga membuat Spanyol kembali mengangkat isu kedaulatan atas Gibraltar pada tahun 2012. Keadaan ini cukup beralasan karena Spanyol melihat potensi yang cukup tinggi dari nilai geostrategi dan geopolitik di Gibraltar. Gibraltar memiliki perekonomian yang maju ditinjau dari sektor pariwisata, sektor jasa maritim, dan sektor keuangan (DW, 2013).



Gambar 1.2 Kapal Royal Navy Inggris HMS Westminister dikirim oleh Inggris ke wilayah Gibraltar tahun 2012 yang menjadi kemunculan konflik kembali dengan Spanyol.

Sumber:

<https://internasional.kompas.com/read/2013/08/09/1231291/Inggris.Kirim.Kapal.Perang.ke.Gibraltar.di.Tengah.Pertikaian.Diplomatik>

Keadaan Spanyol, Gibraltar dan Inggris yang kembali memanas, menjadi semakin bertambah bahkan menuju puncak konflik. Pada tahun 2013, Gibraltar menenggelamkan sekitar 70 blok beton di daerah lepas pantainya. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat Gibraltar ini karena untuk melindungi populasi ikan miliknya. Tetapi, hal tersebut telah merusak pukat milik para nelayan Spanyol yang sedang mencari ikan di daerah pantai dan juga dianggap sebagai upaya untuk mengurangi akses para nelayan Spanyol di perbatasan tersebut. Padahal, upaya penenggelaman 70 blok beton yang dilakukan Gibraltar mendapatkan dukungan dari Greenpeace. Pihak Greenpeace menganggap bahwa pukat ikan yang digunakan oleh para nelayan Spanyol itu justru bisa merusak terumbu karang yang ada di dasar laut. Namun, pemerintah Spanyol menanggapi bahwa seharusnya Gibraltar tidak ada urusan atau wewenang atas daerah lepas pantai. Sehingga, mereka tidak berhak

melakukan penenggelaman blok beton tersebut tanpa persetujuan dari pemerintah Spanyol.

Perselisihan akibat penenggelaman blok beton ini menjadi pendorong bagi isu yang kembali diangkat oleh Spanyol. Gibraltar dengan posisi geopolitik yang sangat strategis dan sekaligus sebagai pelabuhan terbesar di wilayah Mediterania dinilai dapat mendatangkan berbagai pemasukan bagi keuangan Gibraltar, dan Spanyol melihat ini sebagai salah satu peluang bagi perekonomian Spanyol yang sedang diterpa krisis ekonomi pada saat itu. Spanyol juga memiliki persepsi bahwa Gibraltar merupakan peninggalan zaman kolonial yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, Spanyol selalu melakukan berbagai strategi untuk menghadapi sengketa kedaulatan Gibraltar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan pertanyaan “Bagaimana Strategi Pemerintah Spanyol dalam Menghadapi Sengketa Wilayah Gibraltar dengan Inggris pada Tahun 2013-2017?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi dari pemerintah Spanyol dalam menghadapi sengketa wilayah Gibraltar dengan Inggris.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai strategi pemerintah Spanyol dalam menanggapi sengketa wilayah Gibraltar dengan Inggris.
3. Memberikan informasi bagi pengkaji hubungan internasional yang khususnya tertarik dengan topik strategi dan sengketa wilayah.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pokok permasalahan di atas penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut :

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sebuah perangkat berupa nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan juga memajukan kepentingan nasional suatu negara dalam kancah dunia internasional. Hal ini juga berupa suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri dan sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar negaranya (Yanyan Mochamad Yani, 2007).

Salah satu model dari politik luar negeri adalah model strategi atau biasa disebut juga dengan model rasional. Model ini memiliki asumsi dasar bahwa negara dapat dikatakan sebagai aktor yang selalu berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuan negaranya dengan berdasar pada perhitungan secara rasional sesuai dalam sistem politik global. Dalam model strategi dijelaskan tentang pola secara umum atas kesinambungan juga perubahan politik luar negeri merupakan asumsi perhitungan secara rasional dari para pembuat keputusan. Sehingga, John P. Lovell merumuskan beberapa bentuk interaksi antar negara dalam perspektif strategi yaitu *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accommodation strategy*, serta *concordance strategy* (Yanyan Mochammad Yani. MAIR.).

		penilaian tentang strategi lawan	
		mengancam	mendukung
perkiraan kemampuan sendiri	lebih kuat	konfrontasi	memimpin
	lebih lemah	akomodasi	konkordan

Gambar 1.3 Perspektif Strategi Politik Luar Negeri John Lovell

Sumber: John P. Lovell "Foreign Policy in Perspective" dalam buku Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, karangan Mochtar Masoed, halaman 190

Leadership Strategy memiliki pengertian sebagai strategi dimana negara pembuat keputusan menganggap kekuatan atau kemampuan negaranya lebih kuat dibandingkan dengan negara lainnya. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan *bargaining* atau tawar menawar bukan dengan kekerasan. Strategi dari negara lain juga dipercaya akan mendukung atau bekerjasama dengan strategi negara pembuat keputusan.

Kemudian, *concordance strategy* memiliki arti berkebalikan yaitu sebuah strategi dimana negara pembuat keputusan beranggapan bahwa kemampuan negaranya lebih lemah daripada negara yang lain. Maka dari itu, negara pembuat keputusan akan memilih strategi ini dan cenderung akan menjalin hubungan secara baik dengan negara lain yang kemampuannya lebih kuat. Negara pembuat keputusan akan membuat kebijakan-kebijakan yang meminimalisir konflik dalam strategi ini serta mendukung insiatif dari negara lain yang lebih kuat.

Ketiga, *accommodation strategy* merupakan strategi yang diambil oleh negara pembuat keputusan ketika kemampuan negaranya dipandang lebih lemah dari negara lain dan memandang kemampuan negara lain akan mengancamnya. Maka dari itu, sikap dari negara pembuat keputusan dalam strategi ini adalah dengan menyesuaikan diri melalui kegiatan diplomasi, yaitu negosiasi.

Terakhir adalah *confrontation strategy*, merupakan kebalikan dari *accommodation strategy* yang berarti suatu negara pembuat keputusan merasa kekuatan negaranya lebih kuat dari negara lain dan ditambah dengan adanya ancaman dari negara lain juga. Dalam strategi konfrontasi biasanya negara pembuat keputusan akan melakukan beberapa taktik embargo, paksaan atau penekanan terhadap negara lain. Taktik yang biasanya diambil oleh suatu negara yang melakukan *confrontation strategy* yaitu akan mencoba mempertajam isu-isu yang didalamnya terdapat konflik kepentingan dengan negara lawan, bahkan cenderung mengandung paksaan dan penekanan supaya negara lawan bisa mengakui superioritas kapabilitas dari negara pelaku *confrontation strategy*.

Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa pembuatan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi dari suatu negara, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam model strategi politik luar negeri John P. Lovell, terdapat salah satu perspektif strategi tersebut masuk ke dalam masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu *confrontation strategy*. Konfrontasi merupakan sebuah cara untuk melawan atau menentang musuh secara langsung dan agresif. Dalam hubungan internasional biasanya terjadi oleh antar negara dan identik dengan bidang politik atau militer.

Pemerintah Spanyol mengambil strategi konfrontasi karena merasa kapibilitasnya lebih kuat dari pada Gibraltar. Selain itu, Spanyol juga beranggapan bahwa strategi yang diterapkan oleh negara lawan yaitu Gibraltar beserta Inggris dapat mengancam

posisi Spanyol. Sehingga, bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol bersifat menekan dan memaksa. Kebijakan tersebut sebagai wujud strategi supaya Gibraltar dan Inggris tidak meremehkan kepentingan Spanyol di sengketa wilayah antara mereka. Hal ini dikarenakan, Spanyol memiliki persepsi bahwa Gibraltar merupakan peninggalan zaman kolonial yang harus diperjuangkan.

E. Hipotesa

Strategi Pemerintah Spanyol dalam Menghadapi Sengketa Wilayah Gibraltar dengan Inggris pada Tahun 2013-2017 yaitu:

1. Spanyol membuat strategi untuk menekan Gibraltar dan Inggris dengan mempertajam isu-isu politik agar memicu konflik.
2. Spanyol menerapkan strategi dengan penerapan sebuah kebijakan penutupan ruang udara dan pajak biaya masuk bagi seluruh warga Gibraltar dan Inggris yang berada di wilayah Spanyol.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bagian kerangka pemikiran sebagai dasar acuan. Menurut Moleong, penelitian secara kualitatif di definisikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang ada dan dialami oleh subjek dari penelitian tersebut, misalkan saja pemikiran atau ideologi, perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya melalui cara deskripsi ke dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Kumpulan Pengertian, n.d.).

Disamping itu, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis secara luas dan lengkap, dalam penulisan ini juga menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dengan cara studi literature menggunakan metode *Library Research* dari berbagai literature, seperti buku, jurnal,

dokumen, artikel, kemudian media massa cetak maupun online, data-data pada website, dan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis tentang *Strategi Spanyol dalam Menghadapi Sengketa Wilayah Gibraltar dengan Inggris pada Tahun 2013-2017*.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dan menggunakan batasan waktu. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan tentang pokok permasalahan yang diangkat. Dengan diterapkannya batasan ruang lingkup pembahasan, penulis hanya akan memfokuskan pada dua negara yaitu Spanyol dan Inggris beserta Gibraltar. Penulis juga membatasi pembahasan dengan menggunakan subjek pembahasan yaitu negara Spanyol.

Selain itu, penulis juga menggunakan batasan waktu sesuai dengan judul skripsi yaitu pada tahun 2013 pasca adanya puncak konflik di pantai Spanyol dan Gibraltar sampai dengan tahun 2017 dimana Spanyol dan Inggris mengadakan pertemuan kembali untuk membicarakan kejelasan hubungan Bilateral kedua negara atas sengketa wilayah Gibraltar tersebut. Hal ini sesuai dengan latar belakang masalah yang ditulis yaitu di tahun 2013 Gibraltar melakukan penenggelaman sekitar 70 blok beton di daerah lepas pantainya dan merusak pukat para nelayan Spanyol. Berawal dari konflik ini hubungan Spanyol dan Inggris memburuk sampai sekarang. Namun penulis hanya membatasi hingga tahun 2013 sebagai munculnya kembali konflik sampai dengan perundingan kembali kedua negara di tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur-unsur metodologi karya ilmiah yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang profil, sejarah singkat, serta sistem politik dan pemerintah negara Spanyol.

Bab III: Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika konflik yang terjadi di Gibraltar antara Spanyol dengan Inggris.

Bab IV : Pada bab ini akan dijelaskan analisa mengenai strategi apa saja yang dilakukan oleh Spanyol terhadap sengketa Gibraltar dengan Inggris.

Bab V: Merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya.